

MAKNA INTEGRASI DENGAN INDONESIA MENURUT ORANG PAPUA

Sebuah Perspektif Antropologi Kebudayaan

OLEH: NELES TEBAY

(Koordinator Jaringan Damai Papua - JDP)

Seminar Akhir Tahun

**“INTEGRASI SOSIAL EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN SOSIAL
POLITIK PAPUA KE INDONESIA: TINJAUAN AKADEMIK”**

Kamis, 18 Desember 2014 | Pkl. 09.00-16.00 WIB, Auditorium LIPI, Lt.2 - Jakarta

Kerjasama Tim Kajian Papua P2 Politik dengan Jaringan Damai Papua (JDP)



MAKNA INTEGRASI DENGAN INDONESIA MENURUT ORANG PAPUA

Sebuah Perspektif Antropologi Kebudayaan

Oleh Neles Tebay

Pengantar

Pada tanggal 1 Mei 1963, Papua yang waktu itu disebut Irian Barat diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia. Tanah Papua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka umur Integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia sudah mencapai 51 tahun. Dalam makalah ini, kami ingin merefleksikan makna integrasi Papua ke dalam Indonesia, menurut pengalaman orang Papua. Pengalaman hidup orang Papua dalam Republik Indonesia akan disoroti dari perspektif antropologi kebudayaan dalam dua periode yakni periode 1963 -s/d- 2000 dan periode 2001 -s/d- 2014. Pertanyaan pokok yang membimbing refleksi ini adalah: Sejauh mana orang Papua mengalami bahwa dirinya, termasuk kebudayaannya, diterima dan diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia?

1. Makna integrasi 1963-2000

Selama tiga puluh tujuh tahun berintegrasi dengan Indonesia, orang Papua belajar hidup bersama dengan sesama Orang Indonesia dari daerah dan provinsi lain. Dari perspektif antropologi kebudayaan, muncul tiga pandangan yang memberikan makna integrasi bagi orang Papua dalam Republik Indonesia.

Pertama, orang Papua dipandang sebagai makhluk primitif, belum maju, masih berada pada taraf awal dari perkembangan manusia. Semua kehidupan berlangsung menurut hukum adat. Segala permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan diselesaikan menurut praktek dan tradisi kebudayaan. Pandangan ini diperkuat oleh tidak adanya pendidikan formal di tengah orang Papua. Orang Papua masih terbelakang karena tidak memiliki pengetahuan modern.

Pandangan di atas terungkap ketika melihat orang yang menggunakan koteka. Koteka dipandang sebagai simbol keterbelakangan dan keprimitifan yang memalukan bagi Pemerintah Indonesia. Pemerintah mengira bahwa orang pakai koteka karena tidak mempunyai pakaian, maka diluncurkan operasi koteka dimana pakaian dibagikan secara gratis agar dipakai dan dengan demikian koteka tidak dipakai lagi. Jadi koteka tidak dipandang sebagai hasil dari *local genius*. Dengan demikian, orang Papua yang mengenakan koteka dipandang sebagai primitif, terbelakang, belum tahu banyak tentang modernitas.

Pandangan ini juga terungkap dalam pandangan kebanyakan orang Indonesia terhadap Suku Koroway. Sudah dilaporkan banyak pihak bahwa orang Karoway membangun rumah di atas pohon. Kehidupan di atas pohon dipandang sebagai simbol dari keterbelakangan dan keprimitifan. Tidak ada orang Indonesia yang merasa bangga terhadap orang Koroway. Pemerintah bahkan mungkin merasa malu karena setelah 69 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata masih ada orang Indonesia yang hidup di pohon. Mungkin juga banyak orang Indonesia merasa prihatin dan bahkan merasa kasihan karena orang lain sudah menginjak bulan tetapi orang Koroway masih hidup di pohon. Maka mereka harus diturunkan dari pohon agar bisa hidup di atas tanah.

Ketika semua unsur kebudayaan Papua yang dipandanginya bercorak primitif, dan terus-menerus mendengarkan pernyataan tentang keprimitifan kebudayaan ini, maka salah satu akibatnya adalah orang Papua sendiri tidak menghargai budayanya sendiri. Mereka merasa malu menggunakan bahasa daerahnya, terutama di hadapan orang dari luar sukunya, karena takut dipandang sebagai primitif atau masih kuno. Anak-anak muda kini lebih lincah berbahasa Indonesia dari pada berbahasa daerah karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di rumahnya.

Kedua, sebagai konsekuensi dari pandangan pertama ini, maka kebudayaan Papua dipandang sebagai penghambat pembangunan. Orang Papua belum bisa berkembang, karena hidupnya masih terikat dengan tradisi kebudayaannya. Kami biasa mendengar kalimat seperti ini, “orang disini masih terikat pada adat sehingga sulit maju”. Pandangan ini melahirkan suatu stereotype bahwa “orang Papua tidak mampu, atau tidak bisa.” Dengan demikian tradisi kebudayaannya pun tidak diperhitungkan sama sekali dalam membuat kebijakan pembangunan di Papua.

Bagi pemerintah Indonesia, tidak ada hal menarik yang dapat dipelajari dari kebudayaan tradisional Papua. Maka bisa dimengerti apabila tidak banyak orang Indonesia yang melakukan penelitian terhadap kebudayaan Papua. Profesor Koentjaraningrat menjadi satu-satunya pakar antropologi kebudayaan mempublikasi hasil penelitian tentang kebudayaan-kebudayaan di Papua. Keenganan orang Indonesia mempelajari kebudayaan Papua dapat dipahami karena orang biasanya ingin mempelajari sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang primitif. Studi tentang budaya Papua tidak ada gunanya karena tidak ada yang bisa dipelajari untuk hidup dan mengembangkan diri. Kebudayaan Papua tidak diperlukan demi kemajuan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Maka kebudayaan Papua tidak diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk di Tanah Papua.

Maka dapat dimengerti apabila kebudayaan Papua, selain ukiran asmat dan sejumlah lagu Papua, kurang dipromosikan dan karena itu tidak dikenal di persada nusantara. Akibatnya adalah tidak dikenali karakter orang Papua. Pemerintah pun tidak mengetahui nilai-nilai fundamental yang menopang hidup orang Papua sejak dahulu hingga kini. Orang Papua yang membawa busur

dan anak panah yang merupakan symbol kejantanan dari perspektif budaya salah dimengerti sebagai alat tajam untuk membunuh orang. Maka apabila orang Papua melakukan tarian masal dengan membawa busur dan anak panah, ada pihak yang secara keliru berpikir bahwa mereka dibawah ancaman pembunuhan dari orang setempat maka penembakan dilakukan untuk membela diri.

Ketiga, mungkin karena adanya cerita bahwa ‘orang Papua makan daging manusia’, orang Papua, dari perspektif kebudayaan, dipandang sebagai orang yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas kebudayaan dari orang Papua dikuatirkan dapat mengobrak-abrik keutuhan Indonesia. Oleh sebab itu, Orang Papua dilarang menyebut dirinya orang Irian, apalagi orang Papua, karena kata “Papua” terdapat dalam nama Gerakan yang melawan pemerintah Indonesia yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM). Orang Papua dididik untuk menyebut dirinya sebagai Putera Indonesia dari Provinsi Irian Jaya. Orang Papua juga tidak boleh mengakui rasnya yakni Melanesia. Saya masih belum mengerti, apakah orang Papua harus mengakui identitas kulturalnya sebagai orang Melayu?

Mengakhiri bagian ini, dapat kita katakan bahwa ketika kebudayaan Papua dipandang primitif, maka orang Papua pun dilihat sebagai orang yang primitif. Ketika kebudayaan Papua dipahami sebagai penghambat kemajuan dan pembangunan, maka para pemangku kebudayaannya dipandang sebagai “orang yang tidak bisa atau mampu” dan karena itu tidak dapat dilibatkan dalam pembangunan. Ketika kebudayaannya ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keutuhan Negara Indonesia, maka orang Papua dicurigai sebagai ancaman terhadap republik ini. Hingga tahun 2000, orang Papua masih dilihat dan diperlakukan sebagai orang luar, secara kultural belum diintegrasikan dalam Indonesia.

2. Makna integrasi 2001-2014

Pengakuan identitas kultural dari orang Papua dalam Republik Indonesia diawali oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang secara populer dipanggil Gus Dur, tanggal 31 Desember 1999, dimana dia mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Bagi orang Papua, pergantian nama ini merupakan suatu pengakuan identitas kulturalnya dalam Negara Indonesia yang masyarakatnya pluralistik. Suatu pengakuan bahwa ada kultur Papua di antara kultur-kultur lain di Indonesia. Orang Papua menerima pengakuan identitas kultural tidak secara gratis dari Pemerintah Indonesia. Pengakuan identitas dalam Republik Indonesia merupakan merupakan hasil atau pencapaian dari suatu perjuangan orang Papua selama 36 tahun. Tidak sedikit orang Papua yang mengorbankan nyawanya hanya demi pengakuan identitas kultural dalam sebuah negara yang disebut Indonesia.

Pengakuan identitas kultural oleh Gus Dur ini,selanjutnya diperkokoh melalui penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Orang

Papua memasuki fase baru dalam Republik Indonesia. Dengan menempatkan kata “Papua” dalam nama Undang-undang Otsus ini, orang Papua merasa bahwa identitas kebudayaannya sungguh diterima, diakui, dan karena itu diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia. Orang Papua dapat mengakui identitas kulturalnya, yakni ke-papua-annya dan ke-melanesia-annya dengan bebas dan tanpa merasa takut.

Sekalipun Undang-undang Otsus Papua telah mengakui identitas kultural dari orang Papua dalam Republik Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa masih ada sejumlah masalah kultural yang memperlihatkan belum terintegrasinya Papua secara utuh ke dalam Republik Indonesia. Dari perspektif antropologi kebudayaan, sejumlah masalah (JDP, 2014, hal.52-56) dapat disebutkan sebagai indikator yang memperlihatkan belum terintegrasinya kebudayaan Papua dalam Republik Indonesia.

Patut diakui secara jujur bahwa orang Papua masih merasakan bahwa hak-hak dasar sosial budayanya belum dihargai dan diakui sepenuhnya, bahkan merasa dikorbankan demi implementasi kebijakan dalam proses pembangunan. Norma-norma adat yang dipandang sebagai nilai-nilai adat istiadat orang Papua masih dipandang sebagai hambatan pembangunan, primitif, dan sebagai tanda keterbelakangan. Orang Papua masih menyaksikan perusakan dan penghancuran hutan, pohon, air, kali, sungai, gunung, bukit oleh masyarakat adat dipandang sebagai tempat sakral. Hak milik atas tanah adat belum dihargai secara penuh oleh pihak negara. Orang Papua mengalami bahwa sistem dan struktur pemerintahan adat di Papua belum diakui oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan kearifan lokal. Sistem pemerintahan adat dipandang sebagai hambatan bagi sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Masih adanya kecurigaan dan penolakan antara orang Papua dan non-Papua karena tidak ada komunikasi yang jujur. Selain itu, masih adanya diskriminasi melalui stigma khusus yang dialamatkan pada orang Papua.

Dirasakan bahwa nilai-nilai sistem sosial dan sistem budaya dalam masyarakat adat semakin hilang. Orang Papua dalam Republik Indonesia ini sedang mengalami krisis identitas kultural karena sudah tercabut dari akar kebudayaannya dan belum menyatu nilai-nilai keindonesiaan. Adanya krisis ini terlihat, antara lain, ketika orang Papua merasa minder menggunakan bahasa daerahnya, adanya malpraktek dalam penobatan anak adat oleh tokoh-tokoh adat Papua demi kepentingan politik dan ekonomi, rendahnya penghargaan dan pemahaman orang muda terhadap nilai-nilai budayanya sendiri.

Penutup

Ternyata integrasi territorial belum menjamin integrasi kultural. Sekalipun wilayah Papua sudah diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia sejak 1963, dapat dikatakan bahwa orang Papua dari perspektif antropologi kebudayaan belum merasa diintegrasikan ke dalam Republik

Indonesia. Orang Papua masih seperti orang asing dalam Rumah Indonesia. Orang Papua tidak diperlakukan sebagai tuan rumah Indonesia atau pemilik Negara Indonesia ini. Orang Papua merasa diperlakukan seperti penumpang liar di kapal yang bernama Negara Indonesia. Orang Papua merasa belum diterima dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya, karena selalu ditempatkan sebagai orang luar.

Maka jelaslah bahwa bukan orang Papua yang tidak mau mengintegrasikan diri ke dalam Republik Indonesia, tetapi Pemerintah Indonesia yang belum menerima dan mengakui orang Papua secara penuh sebagai orang Indonesia. Penolakan secara kultural terhadap orang Papua dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistimatis. Maka upaya integrasi kultural orang Papua ke dalam Republik Indonesia pun perlu dilaksanakan secara masif, terstruktur, dan sistimatis.

Upaya integrasi kultural ini sudah dimulai oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang menggantikan nama Irian Jaya menjadi Papua. Pengakuan kultural ini selanjutnya dikukuhkan melalui Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001. Tetapi integrasi orang Papua secara kultural ke Republik Indonesia belum terlaksana sepenuhnya, karena masih banyak masalah kebudayaan yang perlu dicarikan solusinya. Solusi-solusi kultural ini perlu dicarikan secara bersama melalui dialog Papua dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
